



**LAPORAN KEGIATAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
PLTGU CILEGON**

MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020-2021

Tanggal 3 sampai dengan 5 Desember 2020

**SEKRETARIAT KOMISI VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

PLTGU Cilegon *Operation and Maintenance Services Unit* (OMU) berlokasi di Desa Margasari Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang dengan kapasitas terpasang 1 x 740 MW. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Cilegon berlokasi di Jalan Raya Bojonegara, Desa Margasari, Serang, Banten untuk sistem kelistrikan Jawa-Bali dihasilkan pembangkit ini. Beroperasi sejak 2006, PLTGU Cilegon dikelola oleh anak usaha PLN, yaitu Indonesia Power. Pembangkit ini terdiri dari 2 unit gas turbin dan 1 unit steam turbin. Masing-masing gas turbin memproduksi listrik sebesar 240 MW. Lalu sisanya berasal dari steam turbin. Panas yang dihasilkan gas turbin digunakan untuk memanaskan air dan menghasilkan uap, uap itu untuk menghidupkan steam turbin. PLTGU Cilegon setiap hari membutuhkan gas sebanyak 110 BBTUD. PLTGU Cilegon yang memasok listrik ke sistem pembangkitan Jawa-Bali, membutuhkan gas 120 BBTUD. Sesuai kontrak, CNOOC memasok gas ke PLTGU Cilegon sebanyak 60-90 BBTUD. Sementara, PGN memasok gas 27-40 BBTUD untuk kebutuhan pembangkit tersebut.

PLTGU Cilegon memiliki peran dalam mengantisipasi terjadinya *black out* pada sistem ketenagalistrikan Jamali.

Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT PLTGU Cilegon. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan informasi penting terkait masalah harga gas bagi pembangkit dan jaminan pasokan ketersediaan gas untuk pembangkit untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi VII DPR RI dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama mitra-mitra terkait sesuai dengan fungsinya.

II. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR-RI, sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan DPR RI No.1/DPRRI/I/2020 tentang Tata Tertib,

2. Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tanggal 9 November 2020 masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan diadakannya Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PLTGU Cilegon adalah dalam rangka melihat secara langsung proses operasi dan pemanfaatan gas bumi untuk industri pembangkit serta mendapatkan informasi menyangkut kendala-kendala yang dihadapi.

Secara spesifik hal-hal yang diperoleh informasi antara lain:

Instansi/lembaga	Informasi yang ingin diperoleh
Dirjen Ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Kebijakan terkait PLTGU; ◦ Kebijakan sistem ketenagalistrikan secara nasional khususnya sistem jamali; ◦ Kendala dan hambatan yang dialami; ◦ Dukungan yang diperlukan dari Komisi VII DPR RI
SKK Migas	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Perkembangan pemanfaatan gas bumi di Indonesia; ◦ Jaminan ketersediaan pasokan gas untuk pembangkit ◦ Kendala dan hambatan yang dialami; ◦ Dukungan yang diperlukan dari Komisi VII DPR RI
BPH Migas	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Perhitungan tarif toll fee gas dalam pipa; ◦ Kendala dan hambatan yang dialami; ◦ Dukungan yang diperlukan dari Komisi VII DPR RI
PT. PLN (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Pemaparan sistem jamali; ◦ Peran PLTGU Cilegon dalam sistem jamali; ◦ Antisipasi untuk mengatasi Black Out (mati lampu) agar tidak terulang kembali; ◦ Kendala dan hambatan yang dialami; ◦ Dukungan yang diperlukan dari Komisi VII DPR RI

PT. Indonesia Power	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Pemaparan pembangkit yang dikelola PT Indonesia Power; ◦ Sistem operasional PLTGU Cilegon; ◦ CAPEX dan OPEX PLTGU Cilegon; ◦ Peran penting PLTGU cilegon dalam sistem jamali; ◦ Kendala dan hambatan yang dialami; ◦ Dukungan yang diperlukan dari Komisi VII DPR RI
CNOOC SES Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Komitmen menjamin ketersediaan pasokan gas; ◦ Kemampuan produksi gas dalam 10 (sepuluh) mendatang; ◦ Kendala dan hambatan yang dialami; ◦ Dukungan yang diperlukan dari Komisi VII DPR RI
PT PGN (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Komitmen menjamin ketersediaan pasokan gas; ◦ Kemampuan produksi gas dalam 10 (sepuluh) mendatang ◦ Kendala dan hambatan yang dialami; ◦ Dukungan yang diperlukan dari Komisi VII DPR RI

IV. WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN

Waktu pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PLTGU Cilegon adalah tanggal 3 - 5 Desember 2020. Adapun agenda tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI selama berada di PLTGU Cilegon adalah sebagai berikut:

1. Peninjauan lapangan ke PLTGU Cilegon .
2. Pertemuan sesuai standar protokol kesehatan dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI, Kepala SKK Migas, Bupati Cilegon, BPH Migas, Direksi PT PLN (Persero), Direksi PT Indonesia Power (IP), Presiden Direktur CNOOC SES Ltd, dan Direksi PT PGN (Persero)

V. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PLTGU Cilegon adalah:

1. Mendapatkan penjelasan menyangkut operasional PLTGU Cilegon;
2. Mendapatkan informasi kemampuan PLTGU Cilegon dalam rangka mengantisipasi terjadinya *black out* di jamali;
3. Mendapatkan penjelasan biaya pengangkutan gas ke lokasi PLTGU Cilegon;
4. Mendapatkan penjelasan Harga jual gas ke PLTGU Cilegon;
5. Mendapatkan penjelasan jaminan pasokan gas untuk PLTGU Cilegon;
6. Memperoleh informasi kendala dan dukungan yang diperlukan.

Hasil kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi referensi untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan mitra terkait.

VI. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI adalah sebagai berikut;

1. Persiapan
 - Membuat TOR persiapan pelaksanaan kegiatan.
 - Melakukan Kontak dengan Mitra terkait.
 - Mempersiapkan administrasi keberangkatan.
2. Pelaksanaan
 - Kunjungan Lapangan ke PLTGU Cilegon.
 - Pertemuan dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI, Bupati Cilegon, BPH Migas, Direksi PT. Indonesia Power (IP), Presiden Direktur CNOOC SES Lt, dan Direksi PT. PGN (Persero).
3. Pelaporan
 - Membuat laporan terhadap berbagai masukan berkenaan hasil Kunjungan Kerja Spesifik ke PLTGU Cilegon.
 - Memasukkan usulan/pandangan yang berasal dari para pemangku kepentingan.

- Merumuskan kesimpulan/rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rangka rapat kerja dengan Menteri ESDM serta mitra terkait lainnya.

VII. SUSUNAN ANGGOTA TIM KUNJUNGAN SPESIFIK

Adapun anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI yang melakukan Kunjungan ke PLTGU Cilegon, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. Tim Kunjungan Spesifik Ke PLTGU Cilegon

NO.	NAMA	NO. ANGG.	FRAKSI	JABATAN
1.	Ramson Siagian	A-104	Gerindra	Ketua Tim
2.	Dony Maryadi Oekon	A-106	PDI P	Anggota
3.	Dr. H. Sulaiman Umar Sidiq	A-247	PDI P	Anggota
4.	Dyah Roro Esti Widya Putri, BA, M.Sc	A-322	Golkar	
5.	Dr.Ir..H. Kardaya Warnika,DEA	A-91	Gerindra	Anggota
6.	Katherine A. Oendoen	A-123	Gerindra	Anggota
7.	R. Wulansari	A-96	Gerindra	Anggota
8.	Arkanata Akram,ST, BE (Hons), M.Eng.Sc	A-392	Nasdem	Anggota
9.	H. Abdul Wahab Dalimunthe,SH	A-524	Demokrat	Anggota
10.	Rusda Mahud	A-573	Demokrat	Anggota
11.	Dr.H. Mulyanto,M.Eng	A-450	PKS	Anggota

BAB II

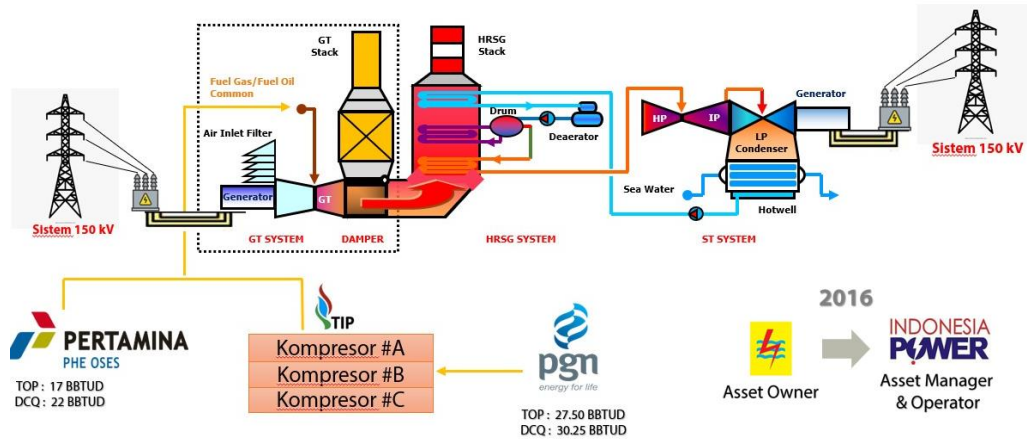
PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam kunjungan kerja spesifik ke PLTGU Cilegon - Provinsi Banten dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan sesuai standar protokol kesehatan di PLTGU Cilegon

Hadir dalam pertemuan antara lain: Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI, Bapak Rida Mulyana; Kadiv Audit KKKS Eksplorasi SKK Migas, Bapak Syukri Usman; Anggota Komite BPH Migas-Bapak Jugi Prayogo; Asisten Administrasi II Kabupaten Serang-Bapak Adjat Gunawan; Direktur Energi Primer PT PLN (Persero), Bapak Rudi; Direktur Utama PT Indonesia Power (IP), Bapak Ahsin Sidqi; GM PLTU Cilegon PT Indonesia Power, Bapak Imanudin; dan Direktur Utama PT PGN (Persero), Bapak Suko Hartono, serta segenap jajaran. Dalam pertemuan tersebut diperoleh informasi dan data sebagai berikut:

- PLTGU Cilegon berperan penting dalam menjaga kestabilan kelistrikan jamali sebagai fast response unit dan sebagai *blackstart* unit untuk PLTU Suralaya dalam inisiatif anti *black out*.
- Pasokan gas ke PLTGU Cilegon harus dijamin agar fungsinya dapat berjalan secara efektif, saat ini pasokan gas PLTGU Cilegon berasal dari PHE OSES (10 BBTUD) dan PGN (27 BBTUD) untuk beban 170 MW *combined Cycle*.
- Pasokan gas dari PHE OSES sudah mengalami menurun (*decline*) dan berpotensi berhenti memberikan pasokan gas di tahun 2021 dan tanpa tambahan pasokan gas di tahun 2021, PLTGU Cilegon tidak mampu beroperasi *combined cycle*.
- Dalam rangka menjaga keberlanjutan operasi PLTGU Cilegon membutuhkan tambahan pasokan gas mulai semester 2 tahun 2021 sehingga total total pasokan minimal sebesar 40 BBTUD.
- Harapannya dapat dilakukan implementasi Kepmen ESDM No.91K/12/MEM/2020 agar biaya pokok produksi tetap efisien.

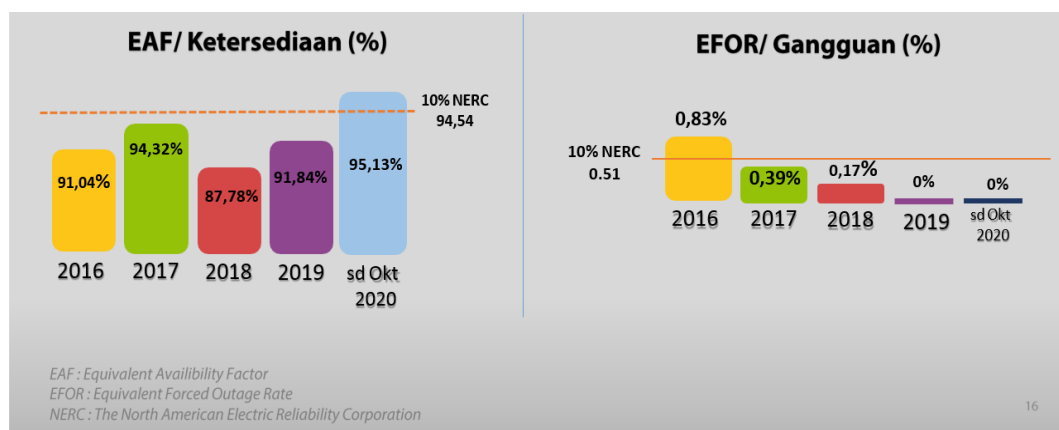


Gambar 1. Profil PLTGU Cilegon

- Diperlukan sinergitas antara PLN dan PT Indonesia Power dengan institusi-institusi terkait baik pemasok seperti PHE OSES, PT PGN (Persero) serta Regulator terkait baik Kementerian ESDM RI dan SKK Migas serta BPH Migas agar faktor-faktor *Availability*, *Affordability*, dan *Accessibility* serta *Sustainability* energi primer gas untuk PLTGU Cilegon bisa tercapai optimal, dan faktor-faktor *Availability*, *Affordability*, dan *Accessibility* serta *Sustainability* energy primer gas tersebut bukan hanya diperlukan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Cilegon tapi juga diperlukan untuk semua PLTGU yang dikelola oleh PLN, baik PLTGU milik sendiri dan atau anak perusahaan seperti PT Indonesia Power serta juga untuk yang dimiliki oleh IPP (*Independent Power Producer*) agar keamanan ketersediaan energi listrik dapat terjamin, bukan hanya untuk sistem Jawa – Madura - Bali tapi juga untuk seluruh wilayah Indonesia yang energi listriknya dihasilkan oleh PLTGU.
- Komisi VII DPR RI sebagai Wakil Rakyat sesuai Amanat UUD 1945 dalam melaksanakan Fungsi Pengawasan berupaya agar kelancaran operasi PLTGU Cilegon dan kelancaran operasi seluruh Pembangkit Listrik yang menggunakan energi primer gas yang dikelola oleh PT PLN (Persero) yang mendapatkan penugasan dari Negara untuk menyediakan energi listrik untuk kepentingan umum dapat berjalan baik. Kami juga menekankan perlunya PT PLN (Persero) dengan institusi terkait meningkatkan keamanan jaringan transmisi agar energi listrik yang dihasilkan oleh PLTGU Cilegon yang masuk kedalam jaringan transmisi Jawa - Madura - Bali bisa berjalan lancar dan hasilnya optimal

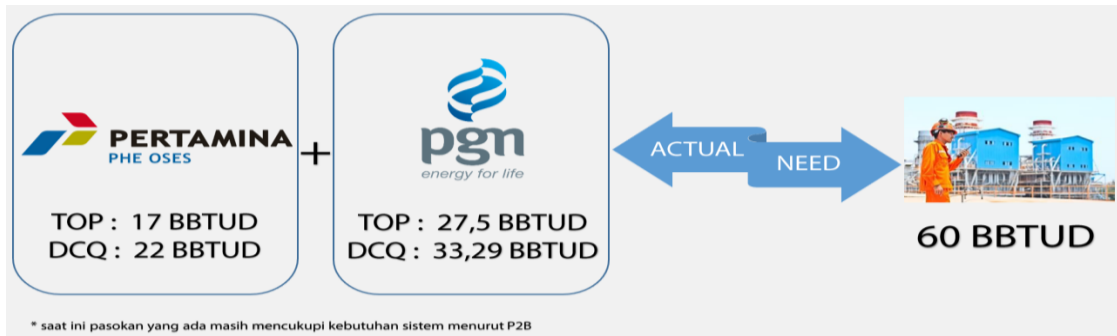
sehingga bisa menjadi bagian pencegahan potensi *black out* atau pemadaman untuk wilayah yang relatif luas.

- Komisi VII DPR RI juga sangat *concern* terhadap pentingnya keamanan ketersediaan energi listrik untuk seluruh wilayah Republik Indonesia tercinta ini. Untuk itu kami mengharapkan penjelasan detail dari PT PLN (Persero) dan atau PT Indonesia Power mengenai ketersediaan energi primer gas dan kelancaran operasi PLTGU Cilegon serta sistem jaringan transmisi yang terkait. Dan jika memungkinkan waktunya, juga diperlukan penjelasan secara umum dari institusi terkait baik pemasok energi primer gas maupun pemerintah atau kementerian ESDM serta regulator SKK Migas dan BPH Migas.



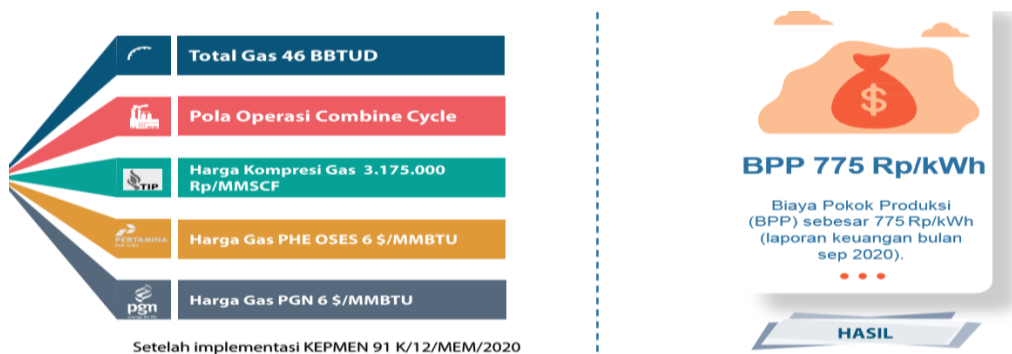
Gambar 2. Kinerja PLTGU Cilegon

- Komisi VII DPR RI berharap dengan pertemuan di PLTGU Cilegon ini yang langsung melihat dilapangan akan menciptakan peningkatan sinergi antara Komisi VII DPR RI dengan mitra kerja Kementerian ESDM, PT PLN (Persero), SKK Migas, BPH Migas, dan PT PGN (Persero) dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan khususnya yang berkaitan dengan keamanan ketersediaan energi primer gas untuk seluruh PLTGU dan kelancaran ketersediaan energi listrik untuk kepentingan seluruh Rakyat Indonesia.
- Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri (Permen) Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik. menegaskan penyesuaian harga gas untuk kebutuhan PT PLN (Persero) menjadi USD 6 per MMBTU yang didasarkan penetapan regulasi harga gas bumi tertentu di bidang industri menjadi USD 6 per MMBTU.



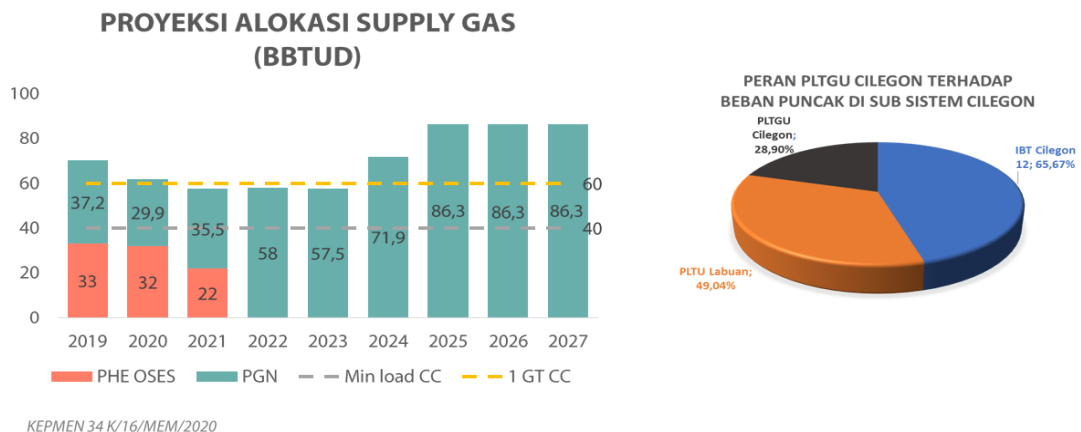
Gambar 3. Kebutuhan gas

- Dalam hal harga Gas Bumi di pembangkit tenaga listrik (*plant gate*) lebih tinggi dari US\$ 6 per MMBTU atau Gas Bumi berasal dari LNG atau *Compressed Natural Gas* (CNG), Menteri menetapkan harga Gas Bumi di pembangkit tenaga listrik (*plant gate*) berdasarkan perhitungan penyesuaian terhadap harga Gas Bumi yang dibeli dari Kontraktor dan ditambahkan dengan biaya penyaluran yang terdiri atas biaya transportasi serta biaya midstream Gas Bumi.
- Penyesuaian terhadap harga gas bumi tidak mengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian Kontraktor. Penyesuaian harga ini merupakan pengurangan dari penerimaan bagian negara yang diperhitungkan melalui bagi hasil sesuai Kontrak Kerja Sama suatu Wilayah Kerja pada tahun berjalan. Besaran pengurangan dari penerimaan bagian negara tersebut paling tinggi sebesar penerimaan bagian negara pada tahun berjalan.
- Dalam menerapkan harga Gas Bumi di pembangkit tenaga listrik (*plant gate*) tersebut, Menteri ESDM dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang kegiatan usaha Gas Bumi, untuk melaksanakan penyaluran Gas Bumi kepada PT PLN (Persero) dan/atau BUPTL.



Gambar 4. Perhitungan Biaya Pokok Produksi (BPP)

- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengoordinasikan dan menetapkan penyesuaian besaran tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
- Pada saat Peraturan Menteri tersebut mulai berlaku, harga Gas Bumi di pembangkit tenaga listrik (*plant gate*) untuk kebutuhan pembangkit tenaga listrik yang telah ditetapkan sebesar paling tinggi US\$ 6/MMBTU, antara PT PLN (Persero) atau BUPTL dengan Kontraktor dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi, tetap berlaku.
- Proyeksi sumber Gas PHE OSES decline dan habis ditahun 2021. hal ini akan berdampak pada pengoperasian Open Cycle PLTGU Cilegon (karena TOP gas PGN), sehingga BPP akan naik sebesar +/- 100 %. Hal ini sudah dimitigasi dengan rencana penambahan supply dari PGN sebesar 15 BBTUD, sehingga Jumlah Kontrak Harian (Daily Contract Quantity) menjadi 40 BBTUD di tahun 2021.



Gambar 5. Proyeksi alokasi suplai gas berdasarkan kepmen ESDM

- Kendala yang dialami oleh PLTGU Cilegon yakni Mesin *blackstart* untuk mengantisipasi kejadian *blackout* belum tersedia Gas PHE menuju *zero flow* ditahun 2022. Tingginya Biaya Pokok Produksi jika pasokan gas kurang dari 40 BBTUD.
- Dukungan yang diperlukan: Dukungan terkait rencana investasi tahun 2021, Dukungan agar Gas PHE tetap menyupply gas ke PLTGU Cilegon atau adanya supply gas tambahan ke PLTGU Cilegon dan Harga Gas tetap \$ 6 atau lebih rendah.

- PGN telah menerapkan implementasi kepmen ESDM No. 91 K/12/MEM/2020 tentang harga gas bumi di pembangkit tenaga listrik di *plant gate* untuk pembangkit PLN, termasuk untuk PLTGU Cilegon mulai 22 April 2020 dengan harga USD 6.00 / MMBTU.
- Alokasi gas dalam dalam Kepmen 91/2020 dari pasokan gas PHE OSES akan berakhir pada tahun 2021. PGN berkomitmen untuk dapat memenuhi kebutuhan tambahan pasokan gas untuk PLTGU Cilegon (kapasitas infrastruktur eksisting PGN = up to 60 BBTUD).
- Dukungan yang diharapkan oleh PGN: PLN dapat mengoptimalkan penyerapan gas sesuai dengan alokasi Kepmen ESDM 91/2020 dan PGN membutuhkan dukungan dari Pemerintah agar dapat berperan sebagai penyedia pasokan gas (dengan portofolio berbagai sumber pasokan gas) untuk memenuhi kebutuhan PLN, baik dengan gas pipa maupun LNG. Penyediaan sumber gas LNG dengan harga kompetitif.



Gambar 6. Pertemuan Tim Kunspek di PLTGU Cilegon

2. Peninjauan lapangan dengan standar protokol kesehatan ke PLTGU Cilegon

Dalam peninjauan lapangan ke lapangan PLTGU Cilegon, Komisi VII DPR RI didampingi oleh Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI, Bapak

Rida Mulyana; Kadiv Audit KKKS Eksplorasi SKK Migas, Bapak Syukri Usman; Anggota Komite BPH Migas-Bapak Jugi Prayogo; Asisten Administrasi II Kabupaten Serang-Bapak Adjat Gunawan; Direktur Energi Primer PT. PLN (Persero), Bapak Rudi; Direktur Utama PT. Indonesia Power (IP), Bapak Ahsin Sidqi; GM PLTU Cilegon PT. Indonesia Power, Bapak Imanudin; dan Direktur Utama PT. PGN (Persero), Bapak Suko Hartono, serta segenap jajaran.



Gambar 7. Kunjungan Lapangan Tim Kunspek ke PLTGU Cilegon

BAB III

KESIMPULAN

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke PLTGU Cilegon - Provinsi Banten dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI meminta dukungan dari tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI agar dapat memperlakukan FABA sebagai Non limbah B3, sehingga mengurangi beban operasional dari PLTU dan meminta dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk dapat digunakan dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah Indonesia Timur.
2. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI menerima informasi dan masukan dari Direktur Utama PT Indonesia Power dan Direktur Primer PT.PLN (Persero), antara lain:
 - PLTGU Cilegon berperan penting dalam menjaga kestabilan kelistrikan jamali sebagai *fast response unit* dan *blackstart unit* untuk PLTU Suralaya dalam inisiatif *anti black out*.
 - Pasokan gas ke PLTGU Cilegon harus dijamin agar fungsinya dapat berjalan secara efektif, saat ini pasokan gas PLTGU Cilegon berasal dari PHE OSES (10 BBTUD) dan PGN (27 BBTUD) untuk beban 170 MW *Combined Cycle*.
 - Pasokan gas dari PHE OSES sudah mengalami menurun (*decline*) dan berpotensi berhenti memberikan pasokan gas di tahun 2021 dan tanpa tambahan pasokan gas di tahun 2021, PLTGU Cilegon tidak mampu beroperasi *combined cycle*.
 - Dukungan terkait rencana investasi tahun 2021, Dukungan agar Gas PHE tetap menyupply gas ke PLTGU Cilegon atau adanya supply gas tambahan ke PLTGU Cilegon dengan Harga Gas tetap \$ 6 atau lebih rendah.
3. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI memandang perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait kepastian jaminan pasokan gas untuk PLTGU Cilegon agar di tahun 2021 tatkala terjadi penurunan lifting gas dari PHE OSES, kinerja PLTGU dapat berjalan dengan baik.

4. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI mendorong PT. PLN (persero) untuk meningkatkan kinerjanya dalam menjamin keandalan sistem ketenagalistrikan dalam rangka menghindari terjadi black out agar tidak terjadi lagi.

BAB IV
PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PLTGU Cilegon , yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 - 5 Desember 2020.

Jakarta, 7 Desember 2020
Tim Kunjungan Kerja Spesifik
Komisi VII DPR RI

RAMSON SIAGIAN